

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Arifand, A., Fathikasari, S. E., Kurniasih, M., Rahmadani, N. F., Putri, A., Setiawan, A. A., dan Rachmadian, A. E. (2023). Membangun harmoni dan toleransi melalui moderasi beragama. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(2), 164–177.
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan tanah wilayah pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 15(1), 27–44.
- Dwiharyani, E., Imamulhadi, I., dan Priyanta, M. (2018). Implikasi hukum pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 250–264.
- Isradjuningtias, A. C. (2017). Faktor penyebab penyimpangan tata ruang studi pembangunan condominium di Kota Bandung. *Veritas et Justitia*, 3(2), 437–467.
- Junef, M. (2021). Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 10(3), 1410–5632.
- Nurdiassa, A., Zulfikar, A., Rasyid, F., dan Wulandari, A. T. (2021). Implementasi kebijakan smart city dalam mewujudkan Makassar Kota Dunia. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1), 37–46.
- Pribadi, R. E. (2017). Implementasi sustainable development goals dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 917–932.
- Sideng, U., Nyompa, S., dan Rahayu, N. C. (2021). Pemetaan tingkat kekritisian untuk daerah resapan dengan wilayah studi kasus Kota Parepare. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 33–46.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Taufiq, A. (2015). Peningkatan pemahaman perangkat kelurahan dan kecamatan terhadap rencana tata ruang wilayah kajian di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 74–80.
- Widiastra, I. M., Rajendra, I. G. N. A., dan Kastawan, I. W. (2019). Implikasi pembangunan fasilitas pariwisata terhadap lingkungan fisik di kawasan sempadan pantai Yeh Gangga Tabanan Bali. *Space*, 6(2), 117–130.

BUKU

- Creswell, John W. (2014). *Penelitian kualitatif dan desain riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juwono, P. T. dan Subagiyo, A. (2017). *Ruang air dan tata ruang pendekatan teknis keairan dan pembangunan berkelanjutan dalam penanganan banjir perkotaan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Deni, H. A., Santoso, Y. H., dan Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Prianto, L. (2017). *Dinamika tata pemerintahan daerah dalam formulasi kebijakan tata ruang kota*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

SKRIPSI

- Handayani, H. (2021). *Analisis penerapan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Kota Parepare berdasarkan siyash dusturiyah di Kota Parepare*. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Ikhsan, A. (2019). *Identifikasi perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung*. Disertasi. Universitas Komputer Indonesia.
- Marsuki, M. (2024). *Partisipasi publik dalam formulasi rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi. Universitas Hasanuddin.
- Musthofa, A. dan Progestino, F. P. (2005). *Kajian pembangunan perumahan di bantaran sungai terhadap risiko struktur, ekonomi, dan lingkungan studi kasus Perumahan Griya Perwita Asri II di Sungai Tambakbayan*.
- Pramedyatama, A. J. (2022). *Penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan pantai sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030*. Disertasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Kota Parepare. (2021). *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2041*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai*.

ARTIKEL

Munawaroh, N. (2023). Sanksi jika melanggar rencana tata ruang wilayah. Hukumonline.